

Katalog : 4301002.3312

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI 2016



<https://woningiri>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI

STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN WONOGIRI

2016



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI

STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN WONOGIRI 2016

No. Publikasi : 33120.1733
Katalog BPS : 4301002.3312
Ukuran Buku : 16 cm x 22 cm
Jumlah Halaman : xiii + 103 halaman

TIM PENYUSUN

Pengarah : IR. HERAWATI KUSUMANINGSIH M.M.
Penanggung jawab : NUR ISA PRATOWO SE.,M.Si.
Penyunting : NUR ISA PRATOWO SE.,M.Si.
Penulis : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.
Pengolahan : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.
Gambar Kulit : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.
Infografis : DIAN SISWANTI, S.ST, M.Si.

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2016, bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Wonogiri secara umum. Data yang disajikan mencakup beberapa aspek kegiatan pendidikan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Publikasi ini juga memberikan beberapa konsep dan definisi yang berkaitan dengan statistik kesehatan agar pengguna data dapat lebih memahami data yang disajikan. Kritik dan saran membangun sangat dihargai untuk perbaikan publikasi mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Wonogiri, November 2017
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala,

Ir. Herawati Kusumaningsih M.M.
NIP. 19600526 198501 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	xiii
INFOGRAFIS	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Sistematika Penyajian.....	5
BAB 2 METODOLOGI.....	7
2.1 Sumber Data.....	7
2.2 Ruang Lingkup.....	8
2.3 Kerangka Sampel.....	8
2.4 Pemilihan Sampel.....	9
2.5 Keterwakilan Sampel.....	10
2.6 Konsep dan Definisi.....	12
2.7 Keterbatasan Data.....	18
2.8 Metode Analisis.....	18
BAB 3 PENUNJANG PENDIDIKAN.....	19
3.1 Penggunaan Internet.....	20
3.2 Biaya Pendidikan.....	29
3.3 Bantuan Pendidikan.....	31
BAB 4 PARTISIPASI PENDIDIKAN.....	34
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini.....	35
4.2 Partisipasi Sekolah.....	40
4.3 Angka Partisipasi Sekolah.....	43
4.4 Angka Partisipasi Kasar.....	47
4.5 Angka Partisipasi Murni.....	51
BAB 5 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.....	56
5.1 Angka Melek Huruf.....	57
5.2 Rata-rata Lama Sekolah.....	60
5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	62
LAMPIRAN TABEL	66
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Kegiatan Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	21
Tabel 3.2	Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Tipe Daerah, Jenjang Pendidikan dan Perangkat yang Digunakan untuk Mengakses Internet, Kabupaten Wonogiri 2016	23
Tabel 3.3	Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Lokasi Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	25
Tabel 3.4	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016 (Rupiah)	30
Tabel 4.1	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2016	37
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016	41
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 5 - 24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016	42
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016	45
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016	49

		Halaman
Tabel 4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016	53
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2016	58

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 3.1	Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	26
Gambar 3.2	Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	27
Gambar 3.3	Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	28
Gambar 3.4	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pendidikan menurut Jenis Kelamin KRT dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	32
Gambar 3.5	Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Sumber Bantuan Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	33
Gambar 4.1	Perkembangan Partisipasi Anak yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2014-2016	36
Gambar 4.2	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016	39
Gambar 4.3	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri Tahun 2014, 2015 dan 2016	44
Gambar 4.4	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2014, 2015 dan 2016	48

	Halaman	
Gambar 4.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2014, 2015 dan 2016	52
Gambar 5.1	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, Kabupaten Wonogiri 2013 - 2016	61
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2016	63
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2016	64
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2016	65

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Rumah Tangga menurut Tipe Daerah (ribuan) Kabupaten Wonogiri, 2014-2016	67
Tabel 2	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	68
Tabel 3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	69
Tabel 4	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	70
Tabel 5	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Biaya Pendidikan Tiap Bulan menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	71
Tabel 6	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	72
Tabel 7	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	73
Tabel 8	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2016	74
Tabel 9	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	75

Halaman

Tabel 10	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2014-2016	76
Tabel 11.1	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan)	77
Tabel 11.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016 (Pedesaan)	78
Tabel 11.3	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan +Pedesaan)	79
Tabel 12	Persentase Penduduk Usia 7-12 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	80
Tabel 13	Persentase Penduduk Usia 13-15 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	81
Tabel 14	Persentase Penduduk Usia 16-18 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	82
Tabel 15	Persentase Penduduk Usia 19-24 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	83
Tabel 16	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	84
Tabel 17.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan)	85
Tabel 17.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Pedesaan)	86

	Halaman	
Tabel 17.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan+Pedesaan)	87
Tabel 18.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan)	88
Tabel 18.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Pedesaan)	89
Tabel 18.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan+Pedesaan)	90
Tabel 19.1	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan)	91
Tabel 19.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Pedesaan)	92
Tabel 19.3	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan+Pedesaan)	93
Tabel 20.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan)	94
Tabel 20.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Pedesaan)	95
Tabel 20.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016 (Perkotaan +Pedesaan)	96
Tabel 21	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016	97

		Halaman
Tabel 22	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016	98
Tabel 23	Persentase Siswa Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2014-2016	99
Tabel 24	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2014-2016	100
Tabel 25	Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016	101
Tabel 26	Angka Drop Out menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016	102

Abstraksi

Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan dan keberlangsungan hidup bangsa dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaminkannya dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 (hasil amandemen) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2016 dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Data yang disajikan berkaitan dengan kondisi dan perkembangan pendidikan yang akan dilihat dari tiga aspek yaitu sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, dan hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan maka disajikan pula data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf, dll.



Persentase Siswa Usia 5 Tahun Ke atas yang mengakses Internet menurut perangkat yang digunakan



KOMPUTER

34,11 %



LAPTOP/ NETBOOK/
TABLET

14,89 %



HP / PONSEL

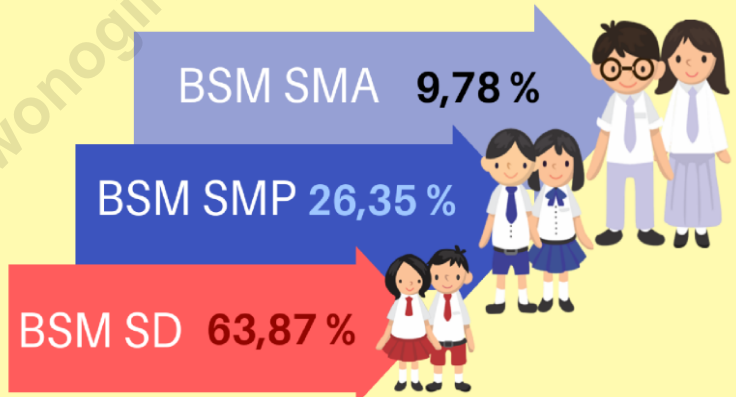
49,94 %



LAINNYA

1,06 %

Persentase
Rumah Tangga
Penerima
Bantuan
Pendidikan
menurut
Sumber
Bantuan
Pendidikan



ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS



93,07 %



80,31 %



86,36 %

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan dan keberlangsungan hidup bangsa dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaminkannya dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 (hasil amandemen) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Pertumbuhan pembangunan ekonomi akan terjadi melalui kontribusi secara signifikan dari sumber daya manusia yang berkualitas. SDM tersebut menjadi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta menguasai teknologi yang nantinya dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif.

Jika dalam membangun pendidikan mengalami kegagalan maka akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan *welfare*

dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Permasalahan pendidikan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan dan kurangnya efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia pendidikan, pemerintah mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju. Salah satu upaya tersebut adalah perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu yaitu dengan menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warna negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu langkah pemerintah untuk mensinergikan program-program pendidikan agar tepat sasaran antara lain dengan adanya program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sasaran program PUS ini antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pemberantasan Buta Aksara, Pendidikan

Kecakapan Hidup, Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan maka dibutuhkan data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf, dll. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran kuantitatif yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan.

1.2 Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyajian publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari tiga aspek yaitu : sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, dan hasil pembangunan pendidikan.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan pencerahan, monitor dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang tertuang

dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.3 Sistematika Penyajian

Bagian awal publikasi ini menyajikan abstraksi untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi. Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian.

Bab 2 menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mencakup sumber data, keterwakilan sampel, konsep dan definisi, keterbatasan data, serta metode analisis.

Bab 3 menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang penggunaan internet, biaya pendidikan dan beasiswa/bantuan pendidikan.

Bab 4 tentang partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, serta pendidikan kesetaraan.

Bab 5 membahas tentang hasil-hasil pembangunan pendidikan yang antara lain dicerminkan oleh angka melek huruf,

rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan putus sekolah.

Data-data pendidikan yang ditampilkan pada tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel-tabel lampiran.

Penjelasan keterwakilan sampel disajikan dalam metodologi.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB 2 **METODOLOGI**

2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015. Jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Kor Susenas Tahun 2016, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai pendidikan seperti sarana prasarana pendidikan, partisipasi pendidikan, dan hasil pembangunan pendidikan.
- b. Data Modul Konsumsi dan Pengeluaran Tahun 2016, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai konsumsi rumah tangga terkait dengan pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Konsumsi dan Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul

Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pada tahun 2011 terjadi perubahan, pengumpulan data konsumsi dan pengeluaran dilakukan secara triwulanan (triwulan I-IV) yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember bersamaan dengan Kor. Susenas Triwulanan dilaksanakan pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2015, pelaksanaan Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan Maret dan September.

2.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Maret 2016 Kabupaten Wonogiri mencakup 800 rumah tangga sampel. Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan pencacahan Susenas pada bulan September dengan sampel kecil 800 rumah tangga sampel hanya bisa digunakan untuk estimasi tingkat Provinsi/Nasional. Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2016 menampilkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014 - 2016.

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama,

kerangka sampel untuk penarikan tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

- Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
- Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar 25% blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya.
- Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

2.4 Pemilihan Sampel

Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut :

- Tahap pertama, memilih 25% blok sensus populasi secara pps (Probability Proportional to Size) dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.
- Tahap kedua, memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.
- Tahap ketiga, memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan dari BPS Pusat setelah hasil pemutakhiran di entri.

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.5 Keterwakilan Sampel

Keterwakilan sampel dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu banyaknya sampel, kesalahan sampling (*sampling error*), dan kesalahan non sampling atau human errors (*nonsampling error*). Keterwakilan sampel ini memengaruhi estimasi hasil pendataan.

(1) Banyaknya sampel

Semakin banyak atau semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka estimasi yang dihasilkan akan semakin mendekati karakteristik populasinya.

(2) Kesalahan non sampling (*NonSampling Error*)

Non sampling error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pelaksanaan survei dan atau saat pengolahan data.

Contoh dalam pelaksanaan survei :

- (i) Penggunaan konsep dan definisi yang salah oleh petugas akibat kesalahan penyampaian dari instruktur ke petugas pencacah maupun pengawas;

- (ii) Tidak ditemukannya rumah tangga sampel;
- (ii) Kesalahan pengertian antara responden dan petugas
- (iii) pencacah pada saat wawancara.

Sedangkan kesalahan pada saat pengolahan :

- (i) Kesalahan pada saat perekaman data (entry data);
- (ii) Kesalahan editing dan coding.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendataan yang bertujuan untuk memperkecil jenis kesalahan ini, namun kesalahan non sampling tidak dapat dihilangkan sama sekali serta sulit untuk dievaluasi secara statistik.

(3) Kesalahan sampling (*Sampling Error*)

Sampling error merupakan kesalahan yang muncul akibat dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Estimasi yang dihasilkan dalam survei tidak terlepas dari *sampling variability*. Secara statistik, besarnya *sampling error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka galat baku (*standard error/SE*). Untuk mengukur sejauh mana sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan parameter populasi digunakan *Relative Standard Error (RSE)*, yaitu hasil bagi SE dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

2.6 Konsep dan Definisi

- a) **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b) **Blok Sensus** adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.
- c) **Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus**

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama

TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) berjumlah 10 orang atau lebih.

d) **Kepala Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART)**

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- e) **Biaya pendidikan** adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden.
- f) **Bantuan Pendidikan** adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti : Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Sumber beasiswa/bantuan pendidikan bisa berasal dari BSM (Bantuan Siswa Miskin; bantuan/beasiswa pemerintah lainnya; lembaga non pemerintah; sekolah maupun perorangan).
- g) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.
- Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).
- Pendidikan formal maupun non formal** yang dimaksud disini adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian

Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.

- h) **Pendidikan anak usia dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- i) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

j) **Partisipasi Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

k) **Angka Putus Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang putus sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

l) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.

m) **Tamat sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda

tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

- n) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum,

Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2/S3 dan sederajat.

- o) **Mengakses internet** adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet seperti : mencari literature/ referensi, mencari/ mengirim informasi/ berita, komunikasi, e-mail/chatting, dll.

2.7 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya tidak dicakup.

2.8 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif satu atau dua sektor dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai perkembangan pendidikan selama beberapa periode waktu. Pada akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran.

BAB 3

PENUNJANG PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Oleh karena itu penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan penunjang pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam pemenuhan pendidikan nasional yang bermutu akan sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata. Sarana prasarana merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Di era modern saat ini, internet merupakan salah satu sarana pendidikan yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Internet dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan.

Gambaran faktor internal rumah tangga dalam upaya memperoleh pendidikan layak bagi seluruh bagi seluruh warga negara akan dibahas pada bab ini, dimulai dari kemudahan penduduk dalam mengakses pendidikan baik dari aspek penggunaan internet, biaya pendidikan termasuk bantuan pendidikan yang diterima rumah tangga.

3.1 Penggunaan Internet

Sebelum adanya Internet, salah satu masalah yang dihadapi oleh pendidikan (di seluruh dunia) adalah akses kepada sumber informasi. Dengan adanya internet, informasi dapat diakses sebanyak-banyaknya, baik informasi berupa artikel, gambar, ataupun video.

Di era digital seperti saat ini, internet sudah menjadi salah satu media yang sangat penting bagi siapapun dalam memperluas wawasannya. Manfaat Internet sekarang sudah dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Salah satu manfaatnya adalah menjadi media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan masa depan. Kehadiran internet bukanlah pengganti sistem pendidikan melainkan lebih bersifat penambah dan pelengkap.

Selain bermanfaat bagi siswa, internet juga dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini disebabkan internet tidak hanya menyajikan informasi-informasi positif saja, namun juga informasi-informasi yang bersifat negatif. Oleh karena itu penggunaan internet oleh siswa sebaiknya mendapat pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015, pada tabel 3.1 memperlihatkan persentase siswa sekolah yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir baik ketika dia mengakses

internet di rumah sendiri, di warnet, di kantor, dengan menggunakan HP/ponsel, maupun mengakses dengan menggunakan modem *portable*.

Tabel 3.1 Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Kegiatan Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenjang Pendidikan	Akses Internet			Jumlah
	Ya	Tidak	Tidak tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
SD/MI	9,41	86,55	4,04	100,00
SMP/MTs	52,77	33,07	14,16	100,00
SM/MA	76,90	15,19	7,92	100,00
PT	92,71	0,00	7,29	100,00
Total	40,36	52,08	7,56	100,00
<u>Pedesaan</u>				
SD/MI	6,75	88,34	4,91	100,00
SMP/MTs	49,55	45,52	4,93	100,00
SM/MA	87,89	3,72	8,39	100,00
PT	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	32,65	61,99	5,36	100,00
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>				
SD/MI	7,25	88,00	4,75	100,00
SMP/MTs	50,19	43,06	6,76	100,00
SM/MA	85,35	6,37	8,28	100,00
PT	95,72	0,00	4,28	100,00
Total	34,28	59,90	5,82	100,00

Persentase siswa yang mengakses internet ternyata lebih sedikit (34,28 persen) dibandingkan dengan siswa yang tidak mengakses internet (59,90 persen) dan tidak mengetahui tentang akses internet (5,82 persen). Adapun siswa di perkotaan lebih banyak yang sudah mengakses internet (40,36 persen) daripada di perdesaan (32,65 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengakses internet juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana teknologi yang memberikan kemudahan dalam mengakses internet, misalnya tersedianya warnet, wifi gratis, dan lain-lain.

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa sebagian besar pengguna internet di kalangan siswa usia 5 Tahun ke atas menggunakan HP/Ponsel untuk mengakses internet (49,94 persen). Semakin bertambahnya penggunaan *handphone* di Indonesia, mempengaruhi jumlah pengguna internet yang mengakses melalui media HP/Ponsel. Hal ini disebabkan karena hampir semua operator selular memberikan akses internet sebagai layanan tambahan di jaringan selular mereka. Sebanyak 34,11 persen siswa menggunakan komputer sebagai sarana untuk mengakses internet, sisanya sebanyak 14,89 persen menggunakan laptop/notebook/tablet dan 1,06 persen menggunakan perangkat lainnya.

Tabel 3.2 Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Tipe Daerah, Jenjang Pendidikan dan Perangkat yang Digunakan untuk Mengakses Internet, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenjang Pendidikan	Alat untuk mengakses Internet				Total
	Komputer	Laptop/ Notebook/tablet	HP/ Ponsel	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Perkotaan</u>					
SD/MI	38,55	31,15	30,31	0,00	100,00
SMP/MTs	34,31	22,05	43,64	0,00	100,00
SM/MA	31,40	20,64	43,94	4,03	100,00
PT	18,06	38,10	39,32	4,52	100,00
Total	29,56	26,86	41,11	2,48	100,00
<u>Pedesaan</u>					
SD/MI	27,27	12,70	60,03	0,00	100,00
SMP/MTs	40,74	9,18	50,08	0,00	100,00
SM/MA	35,26	7,33	56,28	1,13	100,00
PT	28,66	25,53	45,81	0,00	100,00
Total	35,98	9,96	53,58	0,48	100,00
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>					
SD/MI	30,49	17,96	51,55	0,00	100,00
SMP/MTs	39,16	12,35	48,49	0,00	100,00
SM/MA	34,35	10,45	53,39	1,81	100,00
PT	22,25	33,13	41,89	2,73	100,00
Total	34,11	14,89	49,94	1,06	100,00

Internet masa kini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat Indonesia baik di kota maupun di desa. Keberadaannya seperti sudah menjadi hal yang biasa bagi sebagian penduduk dan setiap harinya pula pengguna fasilitas internet di Indonesia semakin meningkat. Sehingga, tidak heran

bila kemudian pola penggunaan internet di daerah perkotaan maupun perdesaan menjadi hampir sama. Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa pengguna internet dengan menggunakan HP/Ponsel di daerah perdesaan (53,58 persen) bahkan bisa lebih tinggi dari daerah perkotaan (41,11 persen).

Pengguna internet dengan media laptop/notebook/tablet di daerah perkotaan sebanyak 26,86 persen lebih besar dibandingkan di pedesaan yaitu 9,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada kesenjangan digital yang kuat antara siswa yang tinggal di daerah perkotaan (lebih sejahtera) dengan yang tinggal di daerah perdesaan (kurang sejahtera). Alasan utamanya adalah karena keterbatasan kepemilikan media laptop/notebook/tablet bagi mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

Jika dilihat berdasarkan lokasi/media dalam mengakses internet (Tabel 3.3), sebagian besar siswa mengakses internet dirumah sendiri (28,80 persen). Sebagian besar pengguna internet yang mengakses di rumah sendiri adalah siswa SM/MA (31,06 persen). Dengan adanya kemajuan internet, informasi yang dulunya sulit digapai kini begitu mudah diakses hanya dengan beberapa klik pada komputer.

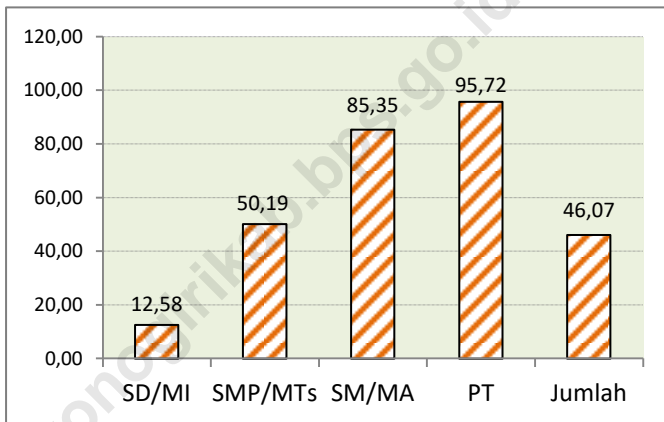
Tabel 3.3 Persentase Siswa Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Lokasi Mengakses Internet dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Lokasi/ Media Akses Internet	Jenjang Pendidikan				Total
	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Rumah Sendiri	30,78	31,37	32,64	30,95	31,62
Bukan Rumah Sendiri	24,15	20,87	17,08	18,44	19,31
Tempat Bekerja/ kantor	0,00	0,00	0,00	7,63	2,04
Sekolah/Kampus	30,78	25,19	25,06	23,26	25,20
Tempat Umum	14,30	16,21	18,87	16,44	16,95
Dalam Kendaraan yang Bergerak	0,00	6,37	6,35	3,27	4,88
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pedesaan					
Rumah Sendiri	27,71	24,97	30,65	27,26	27,89
Bukan Rumah Sendiri	24,05	16,29	18,14	5,26	17,13
Tempat Bekerja/ kantor	5,38	0,62	0,33	8,91	1,72
Sekolah/Kampus	20,63	33,39	28,82	24,38	29,22
Tempat Umum	22,24	24,11	18,78	24,38	21,65
Dalam Kendaraan yang Bergerak	0,00	0,62	3,28	9,81	2,40
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perkotaan+Pedesaan					
Rumah Sendiri	28,38	26,28	31,06	29,19	28,80
Bukan Rumah Sendiri	24,07	17,22	17,92	12,15	17,66
Tempat Bekerja/ kantor	4,21	0,49	0,26	8,24	1,80
Sekolah/Kampus	22,83	31,72	28,06	23,79	28,24
Tempat Umum	20,51	22,50	18,80	20,23	20,50
Dalam Kendaraan yang Bergerak	0,00	1,79	3,90	6,39	3,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Peran media sosial pada era komunikasi sekarang ini sudah sangat menjamur di kalangan masyarakat. Media sosial bisa diakses melalui media apapun. Hal ini yang kemudian memunculkan fenomena akses internet bisa dimanapun termasuk ketika berada dalam kendaraan yang bergerak (3,00 persen). Semakin banyaknya media sosial dan tersedianya sarana

prasarana untuk mengakses internet saat ini memudahkan seseorang untuk selalu online dimanapun berada.

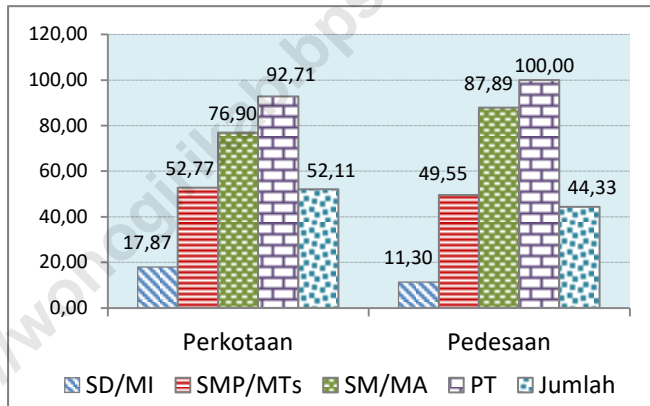
Gambar 3.1 Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016



Pada Gambar 3.1 menampilkan informasi mengenai persentase siswa berusia 10 tahun ke atas yang selama 3 bulan terakhir mengakses internet berdasarkan hasil Susenas 2016 adalah sebesar 46,07 persen. Jika dilihat menurut jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin meningkat persentase siswa yang mengakses internet. Siswa SD/MI yang mengakses internet sebesar 12,58 persen, SMP/MTs sebesar 50,19 persen, SM/MA sebesar 85,35 persen dan PT sebesar 95,72 persen. Mahasiswa di PT dituntut untuk selalu

mengembangkan potensi dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga untuk mahasiswa internet sudah menjadi suatu kebutuhan dan ditunjang juga fasilitas internet yang diberikan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

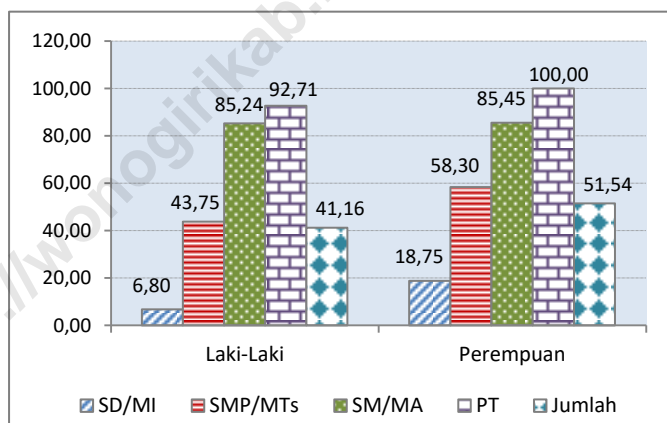
Gambar 3.2 Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016



Jika dilihat menurut tipe daerah (Gambar 3.2), persentase siswa yang mengakses internet di perkotaan (52,11 persen) hampir 1,17 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di pedesaan (44,33 persen). Kondisi yang sama terjadi pada hampir semua jenjang pendidikan kecuali jenjang SM/MA dan PT. Persentase siswa SM/MA dan mahasiswa PT yang mengakses internet di perkotaan sedikit lebih rendah daripada mahasiswa di pedesaan, namun masih pada kisaran diatas 75 persen. Sementara pada

jenjang SD/MI persentase siswa yang mengakses internet di daerah perkotaan (17,87) mencapai lebih dari 1,5 kali lipat dibandingkan di perdesaan (11,30 persen). Hal ini disebabkan aksesibilitas jaringan internet biasanya lebih tersedia di daerah perkotaan.

Gambar 3.3 Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016



Pada gambar 3.2, secara umum menunjukkan kecenderungan siswa perempuan (51,54 persen) lebih banyak mengakses internet dibandingkan laki-laki (41,16 persen). Kondisi yang sama terjadi pada jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs SM/MA dan PT dimana perempuan yang mengakses internet lebih tinggi dibanding laki-laki.

3.2 Biaya Pendidikan

Berdasarkan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (Indirect Cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan yang dicakup dalam Susenas merupakan keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih

bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:

- (i) biaya pendaftaran, yaitu uang pangkal/gedung/daftar ulang;
- (ii) biaya operasional, terdiri atas uang SPP, komite sekolah, praktikum/keterampilan, iuran OSIS, evaluasi/ujian, bahan penunjang mata pelajaran, seragam sekolah dan olah raga, buku pelajaran/panduan/diktat, lembar kerja siswa, alat tulis dan perlengkapannya, kursus yang diselenggarakan sekolah, dan atau biaya rutin operasional pendidikan lainnya;
- (iv) biaya transportasi dan uang saku.

Tabel 3.4 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran Per Kapita Tiap Bulan	Tipe daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbangan Pembangunan Sekolah	1.170	967	1.011
Uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG	3.732	3.315	3.405
Iuran Sekolah Lainnya	392	312	329
Buku pelajaran, Fotocopy bahan pelajaran	636	511	538
Alat-alat tulis	388	347	356
Uang Kursus	403	64	137

Jika dirinci menurut jenis pengeluaran pendidikan, terlihat bahwa pengeluaran pendidikan terbesar berasal dari jenis pengeluaran uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG. Biaya

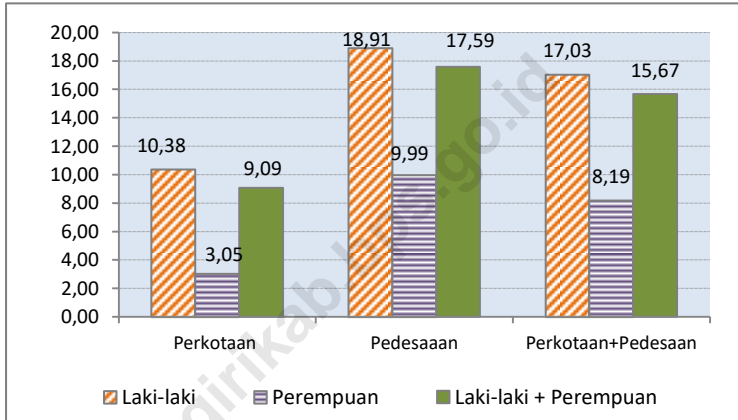
pendidikan per kapita untuk jenis pengeluaran ini di daerah perkotaan sebesar Rp. 3.732,- dan di daerah perdesaan Rp 3.315,-. Sementara total pengeluaran untuk uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG sebesar Rp. 3.405,- per kapita per bulan. Jenis pengeluaran lain yang cukup besar adalah untuk sumbangan pembangunan sekolah, dimana untuk daerah perkotaan sebesar Rp. 1.170,- , untuk daerah perdesaan sebesar Rp. 967,- dan untuk daerah perkotaan dan perdesaan sebesar Rp. 1.011,- per kapita per bulan.

3.3 Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dikeluarkan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Bantuan pendidikan dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.

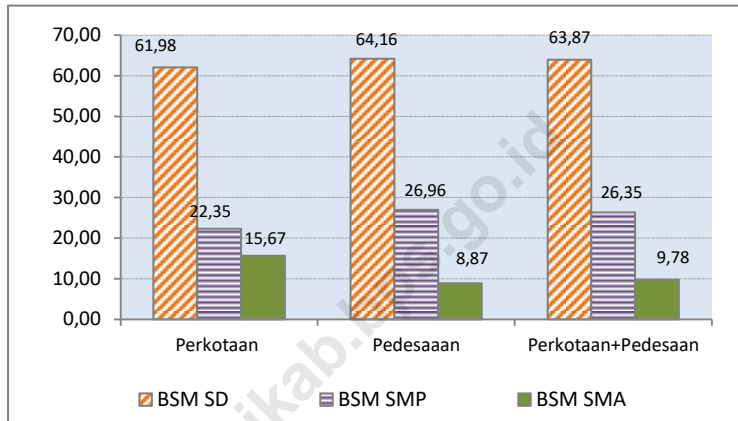
Pada gambar 3.4 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang menerima bantuan pendidikan dengan KRT laki-laki (17,03 persen) lebih tinggi dibanding dengan perempuan (8,19 persen). Dilihat menurut tipe daerah, persentase rumah tangga penerima bantuan pendidikan di daerah perdesaan (17,59 persen) lebih tinggi dibanding daerah perkotaan (9,09 persen).

Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pendidikan menurut Jenis Kelamin KRT dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016



Data Susenas 2016 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga penerima beasiswa menurut sumber bantuan pendidikan ditunjukkan pada gambar 3.5. Sebagian besar sumber bantuan pendidikan yang diterima oleh peserta didik dalam rumah tangga adalah bantuan/beasiswa yang berasal dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tingkat SD/ sederajat (63,97 persen), kemudian BSM SMP/ sederajat (26,35 persen), dan BSM SMA/ sederajat (9,78 persen).

Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Sumber Bantuan Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016



Menurut tipe daerah, persentase Bantuan Siswa Miskin (BSM) tingkat SD/ sederajat di pedesaan (64,16 persen) lebih besar dibandingkan di perkotaan (61,98 persen). Hal sama juga terjadi pada pemberian BSM di tingkat SMP/ sederajat meskipun tidak terlalu besar selisihnya hanya 4,61 persen. Sedangkan BSM tingkat SMA/ sederajat lebih besar diberikan pada daerah perkotaan sebesar 15,67 persen mencapai lebih dari 1,75 kali lipat dibandingkan pedesaan yang hanya 8,87 persen.

BAB 4

PARTISIPASI PENDIDIKAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2015 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

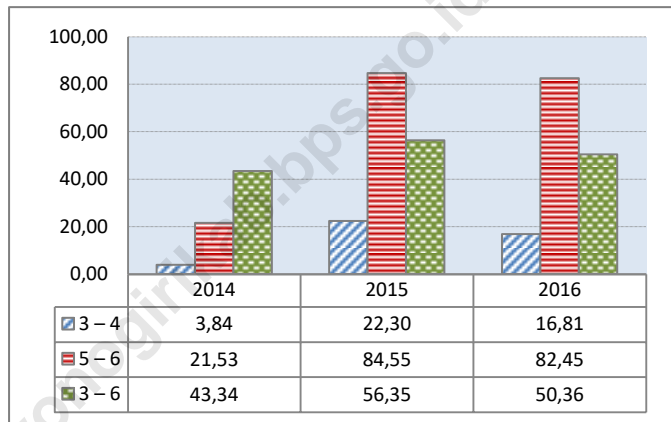
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pasal 1 ayat 14 UU No 20 Tahun 2003 adalah suatu upaya pembinaan yang di tuju kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan Utama PAUD yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Sementara tujuan penyertanya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Penyelenggaraan PAUD berdasarkan Permendiknas no 58 tahun 2009 merupakan salah satu bentuk usaha pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu : perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan

dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

Gambar 4.1 Perkembangan Partisipasi Anak yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2014-2016



Berdasarkan hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan pra sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 43,34 persen anak usia 3-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 50,36 persen. Pada kelompok usia 5-6 tahun, partisipasi dalam mengikuti PAUD juga mengalami peningkatan dari 21,53 persen pada tahun 2014 menjadi 82,45 persen pada tahun 2016.

Tabel 4.1 Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Kelompok Umur				
	0 - 2	3 - 4	5 - 6	3 - 6	0 - 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Perkotaan</u>					
Laki-laki	0,00	8,71	100,00	34,67	13,04
Perempuan	0,00	0,00	70,15	51,20	31,32
Laki-laki+ Perempuan	0,00	5,30	75,69	45,09	22,40
<u>Pedesaan</u>					
Laki-laki	0,00	22,08	89,69	55,76	35,45
Perempuan	0,00	15,61	77,85	46,71	29,09
Laki-laki+ Perempuan	0,00	19,09	84,20	51,57	32,47
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>					
Laki-laki	0,00	19,64	90,53	52,89	30,74
Perempuan	0,00	13,36	75,44	47,77	29,62
Laki-laki+ Perempuan	0,00	16,81	82,45	50,36	30,21

Pada tahun 2016, partisipasi anak yang mengikuti PAUD yang diperlihatkan tabel 4.1 yaitu usia 3-4 tahun sebesar 16,81 persen, usia 5-6 tahun sebesar 82,45 persen, dan usia 3-6 tahun sebesar 50,36 persen. Dilihat menurut tipe daerah, tercatat bahwa partisipasi anak dalam mengikuti PAUD di daerah pedesaan lebih besar dari pada daerah perkotaan. Hal ini dapat menunjukkan makin sadarnya masyarakat pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik mulai anak usia dini. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini juga berpengaruh terhadap keputusan untuk mengikutsertakan

anak dalam pendidikan pra sekolah. Persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD di daerah perkotaan tercatat sebesar 45,09 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun dan 22,40 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun, sedangkan di daerah pedesaan 51,57 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun dan 32,47 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun.

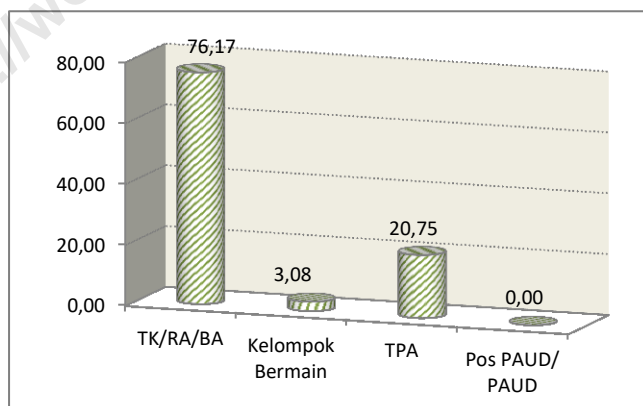
Partisipasi pra sekolah anak laki-laki pada kelompok umur 0-6 tahun (30,74) lebih tinggi daripada perempuan (29,62 persen). Sedangkan untuk kelompok umur 3 – 6 tahun partisipasi pra sekolah anak laki-laki (52,89 persen) juga lebih tinggi dibandingkan anak perempuan (47,77 persen), begitu juga dengan partisipasi pada pada kelompok umur 5-6 tahun.

Pada kelompok umur 3-4 tahun partisipasi pra sekolah untuk anak laki-laki lebih tinggi (19,64 persen) daripada anak perempuan (13,36 persen). Kondisi yang sama juga terjadi di daerah perkotaan, partisipasi pra sekolah pada kelompok umur 3 – 4 tahun dan kelompok umur 5 – 6 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 0-2 tahun belum ada partisipasi pra sekolah untuk anak laki-laki maupun perempuan baik yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan.

Pada Gambar 4.2, memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan pra sekolah yang diikuti anak usia 0-6 tahun adalah TK/BA/RA yaitu sebesar 76,17 persen, kemudian

yang mengikuti Taman Penitipan Anak (TPA) sebesar 20,75 persen, Kelompok bermain sebesar 3,08 persen, sedangkan yang mengikuti pendidikan pra sekolah di pos PAUD/PAUD (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD sejenis lainnya) sangat rendah. Pemerintah menggulirkan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal, serta pemantauannya.

Gambar 4.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016



4.2 Partisipasi Sekolah

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Oleh karena itu pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu upaya lainnya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan

Kemdikbud, Kemenag, Insatansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Laki-laki	2,62	20,28	77,10	100,00
Perempuan	10,87	17,42	71,71	100,00
Laki-laki+ Perempuan	6,91	18,79	74,30	100,00
<u>Pedesaan</u>				
Laki-laki	7,13	20,92	71,95	100,00
Perempuan	15,16	17,48	67,36	100,00
Laki-laki+ Perempuan	11,29	19,14	69,57	100,00
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>				
Laki-laki	6,17	20,79	73,04	100,00
Perempuan	14,23	17,47	68,30	100,00
Laki-laki+ Perempuan	10,35	19,07	70,58	100,00

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 10,35 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 19,07 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 70,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan.

Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan (11,29 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (6,91 persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan, dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan. Sementara Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (19,14 persen) relatif juga lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan (18,70 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perkotaan (74,30 persen) lebih tinggi daripada perdesaan (69,57 persen).

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 5 - 24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-6	73,68	26,32	0,00	100,00
7-12	1,06	98,94	0,00	100,00
13-15	0,00	97,99	2,01	100,00
16-18	0,00	73,11	26,89	100,00
19-24	1,74	12,46	85,81	100,00

Faktor demografis lain yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa terdapat penduduk usia 5-6 tahun yang masih bersekolah yaitu sebesar 26,32 persen, meskipun pada usia ini bukan merupakan usia wajib sekolah. Persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 98,94 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 97,99 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 73,11 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 12,46 persen.

4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

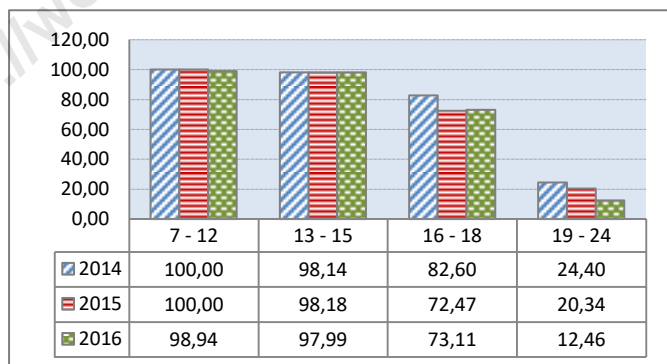
$$APS\ SD = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Ket: APS SMP, murid dan penduduk usia 13-15 thn
 APS SMA, murid dan penduduk usia 16-18 thn
 APS PT, murid dan penduduk usia 19-24 thn

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah

dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau yang lebih. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Gambar 4.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri Tahun 2014, 2015 dan 2016



Gambar 4.3 memperlihatkan perkembangan APS menurut kelompok umur pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Secara umum, partisipasi sekolah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun pada

setiap kelompok umur. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2014 sebesar 100,00 persen, menurun menjadi 98,94 persen pada tahun 2015 dan tahun 2016. Fluktuasi APS terjadi pada kelompok umur 13-15 tahun, dari 98,14 persen pada tahun 2014, naik menjadi 98,18 persen pada tahun 2015 dan turun menjadi 97,99 persen pada tahun 2016. APS kelompok umur 7-12 tahun sudah cukup baik dibandingkan kelompok umur lainnya, karena nilainya sudah mendekati 100.

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Laki-laki	100,00	97,03	74,98	25,36
Perempuan	100,00	100,00	86,48	22,76
Laki-laki+ Perempuan	100,00	98,48	80,01	24,16
<u>Pedesaan</u>				
Laki-laki	99,06	97,32	80,59	8,79
Perempuan	98,32	98,53	62,77	9,12
Laki-laki+ Perempuan	98,69	97,87	70,60	8,96
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>				
Laki-laki	99,25	97,26	78,80	12,87
Perempuan	98,62	98,84	68,02	12,03
Laki-laki+ Perempuan	98,94	97,99	73,11	12,46

Pada tabel 4.4 terlihat secara umum pada tahun 2016 bahwa APS pendidikan dasar (usia 7-12 dan 13-15 tahun) sudah mendekati atau sama dengan 100,00 persen, hal ini berarti hampir semua anak usia 7-15 tahun bersekolah baik di SD maupun SMP. APS pendidikan dasar (usia 13-15 tahun) perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki, sedangkan pada kelompok umur pendidikan menengah (usia 16-18 tahun) dan pendidikan tinggi (19-24 tahun) APS perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Wonogiri tidak mengalami masalah kesenjangan gender pada bidang pendidikan.

APS di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Terutama kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, dimana nilai APS pendidikan pada kelompok umur 19-24 di perkotaan (24,16 persen) lebih tinggi dibandingkan APS kelompok umur 19-24 di perdesaan (8,96 persen). Hal ini disebabkan oleh tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di perkotaan yang jauh lebih baik daripada di daerah perdesaan.

4.4 Angka Partisipasi Kasar

$$APK\ SD = \frac{\text{Jumlah murid SD}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$$

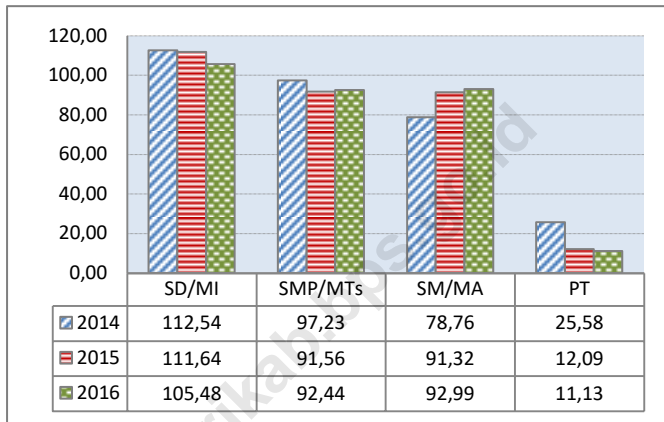
Ket: APK dan murid SMP, penduduk usia 13-15 thn
APK dan murid SMA, penduduk usia 16-18 thn,
APK dan murid PT, penduduk usia 19-24 thn.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya.

APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Gambar 4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2014, 2015 dan 2016



Perkembangan APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Gambar 4.4 menyajikan APK pada jenjang sekolah dasar dan pendidikan tinggi dari tahun 2014, 2015, hingga 2016. Pada tahun 2014, APK jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) angkanya cenderung turun setiap tahun. APK SD/MI pada tahun 2014 tercatat sebesar 112,54 persen, menurun menjadi 111,64 persen pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 105,48 persen pada tahun 2016. Sedangkan APK SMP/MTs menurun dari 97,23 persen tahun 2014 menjadi 91,56 persen pada tahun 2015, kemudian naik menjadi 92,44 persen pada tahun 2016. Bahkan untuk APK pada jenjang PT juga cenderung mengalami penurunan. Sementara pada APK SM/MA pada tahun

2014 tercatat sebesar 78,76 persen, meningkat menjadi 91,32 persen pada tahun 2015 dan menjadi 92,99 persen pada tahun 2016.

Tabel 4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			
	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Laki-laki	102,48	92,76	70,74	28,04
Perempuan	108,31	87,83	92,91	28,95
Laki-laki+ Perempuan	107,17	90,35	80,42	28,46
<u>Pedesaan</u>				
Laki-laki	108,29	96,73	105,57	8,08
Perempuan	102,73	88,49	91,33	3,90
Laki-laki+ Perempuan	103,72	92,98	97,59	5,96
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>				
Laki-laki	105,19	95,97	94,46	12,99
Perempuan	105,55	88,35	91,68	9,25
Laki-laki+ Perempuan	105,48	92,44	92,99	11,13

Jika dilihat menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan pada tahun 2016 (Tabel 4.5) menunjukkan bahwa APK untuk SD secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, daerah perkotaan maupun pedesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini

menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas.

APK menurut jenis kelamin relatif tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah kesenjangan gender pada bidang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, APK laki-laki (105,19 persen) lebih besar daripada APK perempuan (105,55 persen). Sementara pada jenjang yang lebih tinggi, APK laki-laki lebih besar daripada perempuan. APK SMP/MTs/Paket B laki-laki sebesar 95,97 persen, perempuan sebesar 88,35 persen dan APK SM/MA/Paket C laki-laki sebesar 94,46 persen, perempuan sebesar 91,68 persen.

APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dan pendidikan tinggi (PT). Di daerah perkotaan, APK SD/MI sebesar 107,17 persen dan APK PT sebesar 28,46 persen. Untuk daerah perdesaan, APK SD/MI sebesar 103,72 persen dan APK PT sebesar 5,96 persen. Sementara itu pada jenjang SMP/MTs dan SM/MA, APK daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan.

Kesenjangan APK antara SM/MA dibanding PT semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi murid SD di perdesaan yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun hanya sedikit

lebih kecil daripada di perkotaan. Dengan kata lain, sistem pendidikan SD/MI baik di perkotaan maupun perdesaan sudah lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid.

4.5 Angka Partisipasi Murni

$$APM_{SD} = \frac{\text{Jumlah murid jenjang SD usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$$

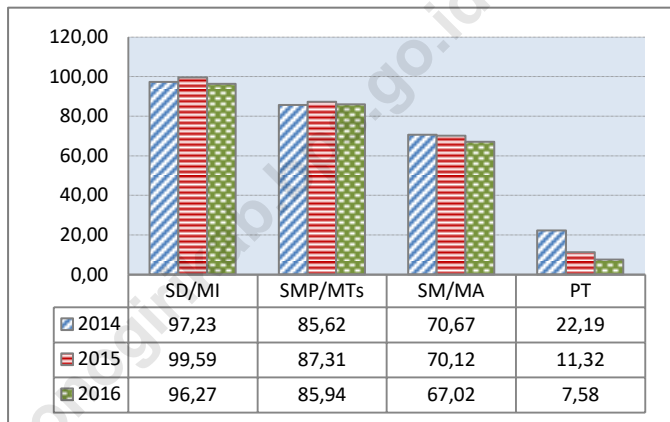
Ket: APK dan murid jenjang SMP usia 13-15 thn, penduduk usia 13-15 thn
APK dan murid jenjang SMA usia 16-18 thn, penduduk usia 16-18 thn
APK dan murid jenjang PT usia 19-24 thn, penduduk usia 19-24 thn

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/MI yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih

rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Gambar 4.5 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri Tahun 2014, 2015 dan 2016



Pada jenjang pendidikan dasar selama periode tahun 2014, 2015 hingga 2016, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs mengalami fluktuasi. APM SD/MI tahun 2014 sebesar 97,23 persen, meningkat menjadi 99,59 persen pada tahun 2015 kemudian turun menjadi 96,27 persen di tahun 2016. Fluktuasi angka APM masih di kisaran nilai lebih dari 90 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI. Adapun pada jenjang SMP/MTs, APM meningkat dari 85,62 87,31 persen pada tahun 2014 menjadi persen pada tahun 2015, dan 85,94 persen di tahun 2016.

APM jenjang pendidikan SM/MA pada tahun 2014 sebesar 70,67 persen, sedikit turun menjadi 70,12 persen pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 67,02 persen pada tahun 2016. Hal sama juga terjadi pada APM jenjang PT yaitu tahun 2014 sebesar 22,19 persen, turun menjadi sebesar 11,32 persen tahun 2015 dan kembali menurun menjadi 7,58 persen tahun 2016.

Tabel 4.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Partisipasi Sekolah			
	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Laki-laki	100,00	92,76	66,17	22,49
Perempuan	100,00	87,83	73,88	18,21
Laki-laki+ Perempuan	100,00	90,35	69,54	20,51
<u>Pedesaan</u>				
Laki-laki	93,87	86,13	76,26	4,60
Perempuan	96,98	83,26	58,15	2,88
Laki-laki+ Perempuan	95,41	84,82	66,10	3,73
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>				
Laki-laki	95,07	87,41	73,04	9,00
Perempuan	97,52	84,24	61,63	6,15
Laki-laki+ Perempuan	96,27	85,94	67,02	7,58

Tabel 4.6 menyajikan bahwa pada tahun 2016 secara umum nilai APM untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen. APM pendidikan cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APM pada jenjang

SD/MI sebesar 96,27 persen, sedangkan pada jenjang di atasnya jauh lebih rendah. Secara berturut-turut APM SMP/MTs sebesar 85,94 persen, APM SM/MA sebesar 67,02 persen, dan APM PT sebesar 7,58 persen.

Dilihat berdasarkan tipe daerah, secara umum APM di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, APM SD/MI sebesar 100,00 persen, APM SMP/MTs sebesar 90,35 persen, APM SM/MA sebesar 69,54 persen dan APM PT sebesar 20,51 persen. Untuk daerah perdesaan, APM SD/MI sebesar 95,41 persen, APM SMP/MTs sebesar 84,82 persen, APM SM/MA sebesar 66,10 persen dan APM PT sebesar 3,37 persen.

Sama halnya dengan pola yang terjadi pada APK, kesenjangan APM antara perkotaan dan perdesaan semakin terlihat pada jenjang PT. Fasilitas perguruan tinggi yang lebih lengkap menyebabkan APM PT di perkotaan (20,51 persen) jauh lebih tinggi daripada perdesaan (3,37 persen). Sementara pada jenjang pendidikan SD/MI, APM tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang signifikan antara APM laki-laki dengan APM perempuan. APM laki-laki lebih besar daripada APM perempuan di hampir semua jenjang pendidikan, kecuali pada jenjang SD/MI. APM jenjang

SD/MI pada laki-laki sedikit lebih rendah daripada APM perempuan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender bukan menjadi masalah dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB 5

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bersaing dapat terbentuk melalui pendidikan bermutu dalam pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak Negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

5.1 Angka Melek Huruf

$$AMH = \frac{\text{Jml penduduk umur 15 thn keatas bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk umur 15 thn keatas}} \times 100$$

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek aksara merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang beralih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi. Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Angka melek huruf merupakan salah satu variable dalam menentukan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat. Dalam pengembangan masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh sasaran perubahan. Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah/ Jenis kelamin	Kelompok Umur					
	10 - 14	15 - 24	25 - 44	45+	10+	15+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>Perkotaan</u>						
Laki-laki	100,00	100,00	100,00	96,76	98,39	98,21
Perempuan	100,00	100,00	99,04	84,02	91,96	91,21
Laki-laki+ Perempuan	100,00	100,00	99,46	90,27	95,08	94,57
<u>Pedesaan</u>						
Laki-laki	98,92	99,11	99,40	87,95	93,75	93,07
Perempuan	100,00	100,00	100,00	63,58	82,05	80,31
Laki-laki+ Perempuan	99,41	99,57	99,72	75,22	87,68	86,36
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>						
Laki-laki	99,14	99,32	99,52	89,90	94,76	94,20
Perempuan	100,00	100,00	99,79	67,90	84,18	82,65
Laki-laki+ Perempuan	99,53	99,67	99,66	78,47	89,28	88,14

Berdasarkan hasil Susenas 2016, kondisi keaksaraan Kabupaten Wonogiri yang disajikan pada tabel 5.1 terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 89,28 persen, sedangkan untuk yang berusia 15 tahun ke atas sebesar 88,14 persen. Rendahnya angka melek huruf pada kelompok umur 15 tahun ke atas ini dipengaruhi oleh kelompok umur 45 tahun ke atas. Persentase penduduk 45 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 78,47 persen.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 10 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 87,68 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 95,08 persen. Kondisi yang hampir sama terjadi pada kelompok umur lainnya dimana persentase penduduk yang melek huruf di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan, kecuali kelompok umur 25-44 tahun yang terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan di daerah perkotaan lebih banyak tersedia fasilitas pendidikan dibandingkan daerah perdesaan.

Persentase penduduk perempuan melek huruf umur 10 tahun ke atas sebesar 84,18 persen, lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 94,76 persen. Kondisi tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dan hampir di semua kelompok umur.

Salah satu target MDGs adalah menjamin pada 2016 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian tersebut adalah angka melek huruf penduduk 15-24 tahun. Jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, angka melek huruf kelompok umur 15-24 tahun cenderung lebih tinggi.

5.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah = Tahun Konversi + (Kelas Tertinggi yang pernah diduduki - 1)

Tahun Konversi Pendidikan yang ditamatkan:

SD = 6 Tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 Tahun; D1/D2 = 14 tahun;

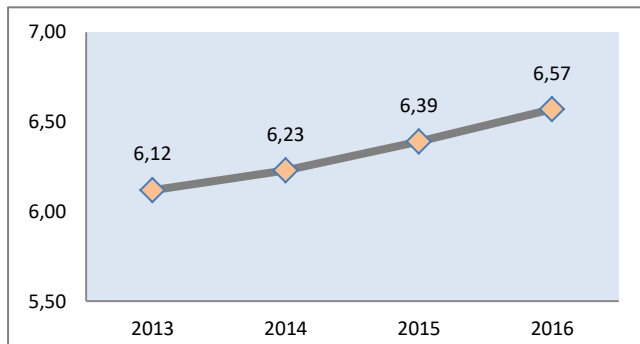
D3 = 15 Tahun; D4/S1 = 16 Tahun; S2/S3 = 18 tahun

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pembentuk indikator IPM dengan metode baru ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk

menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 25 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 5.1 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, Kabupaten Wonogiri 2013 - 2016

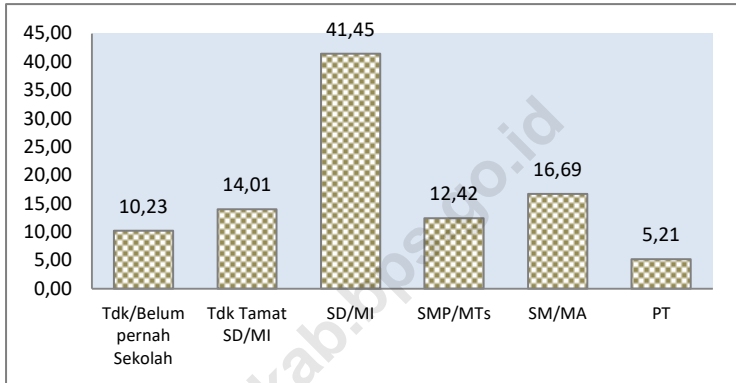


Gambar 5.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2016 mencapai 6,57 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 6 SD (kelas VI) atau putus sekolah di kelas 1 SMP (kelas VII). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 6,12 tahun menjadi sebesar 6,23 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,39 tahun pada tahun 2015 dan menjadi 6,57 tahun pada tahun 2016. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan. Jika rata-rata lama sekolah dapat terus ditingkatkan, diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai.

5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

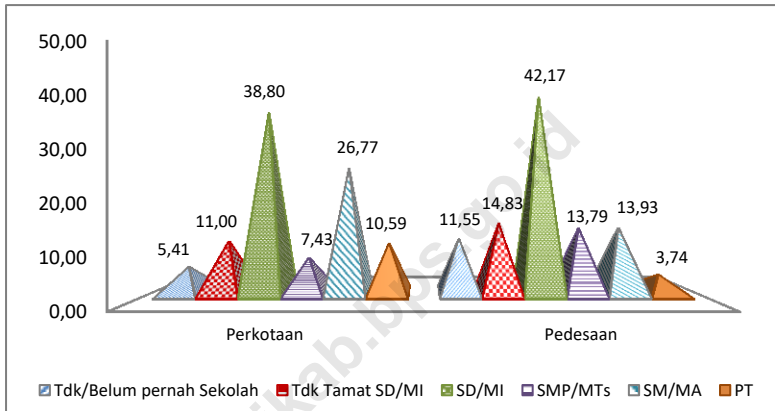
Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2016



Kualitas SDM Kabupaten Wonogiri dapat digambarkan dari pendidikan yang ditamatkan, tersajikan pada Gambar 5.2 yang menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 41,45 persen, diikuti tamat SMP/MTs sebesar 12,42 persen, dan tamat SM/MA sebesar 16,69 persen. Sedangkan persentase penduduk yang tamat PT sebesar 5,21 persen. Disamping itu masih terdapat sebesar 14,01 persen penduduk 15 tahun ke atas yang belum pernah mengenyam pendidikan dan sebesar 14,01 persen pernah bersekolah diSD/MI namun tidak tamat.

Gambar 5.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2016

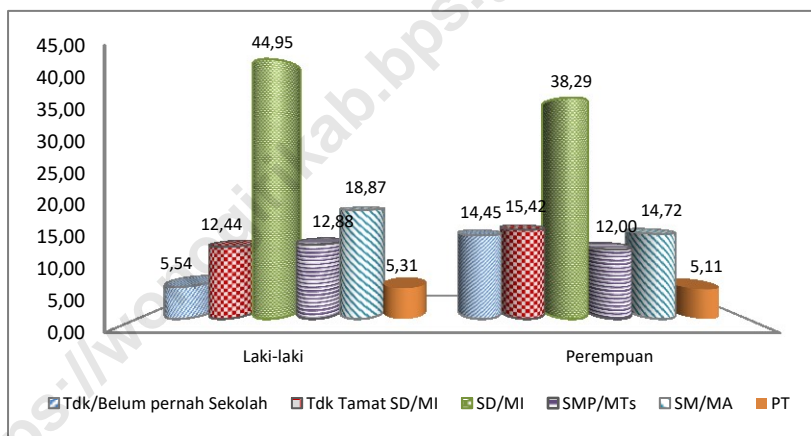


Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk pedesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke atas (SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 44,79 persen, hampir 1,4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pedesaan sebesar 31,46 persen. Sedangkan persentase penduduk yang belum mengenyam pendidikan di pedesaan (11,55 persen) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (5,41 persen).

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang belum pernah mengenyam pendidikan sebesar 14,45 persen, hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 5,54 persen. Selain itu persentase perempuan yang menamatkan

pendidikan SMP/MTs ke atas (SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 31,83 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 37,06 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Gambar 5.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Wonogiri 2016



LAMPIRAN TABEL

Tabel 1 Jumlah Rumah Tangga menurut Tipe Daerah
(ribuan) Kabupaten Wonogiri, 2014-2016

Tahun	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	54,92	214,70	269,63
2015	56,22	224,43	280,65
2016	61,41	210,36	271,77

Sumber: Susenas 2014-2016

Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	100,38	104,91	205,29
Pedesaan	361,99	383,95	745,95
Perkotaan + Pedesaan	462,38	488,86	951,24

Sumber: Susenas 2016

Tabel 3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016

Kelompok Umur	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-2	9,83	24,98	34,81
3-4	4,22	21,29	25,50
5-6	5,49	21,18	26,67
7-12	16,27	70,52	86,79
13-15	9,91	39,03	48,93
16-18	7,74	21,17	28,91
19-24	12,84	43,00	55,84
25-44	51,81	188,02	239,83
45+	87,20	316,75	403,95
Total	205,29	745,95	951,24

Sumber: Susenas 2016

Tabel 4 **Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (ribuan) dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Kelompok Umur	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-2	4,79	3,35	3,66
3-4	2,05	2,85	2,68
5-6	2,67	2,84	2,80
7-12	7,93	9,45	9,12
13-15	4,83	5,23	5,14
16-18	3,77	2,84	3,04
19-24	6,25	5,77	5,87
25-44	25,24	25,21	25,21
45+	42,47	42,46	42,48
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 5 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Biaya Pendidikan Tiap Bulan menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tiap Bulan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbangan Pembangunan Sekolah	1.170	967	1.011
Uang sekolah (SPP) dan Iuran BP3/POMG	3.732	3.315	3.405
Iuran Sekolah Lainnya	392	312	329
Buku pelajaran, Fotocopy bahan pelajaran	636	511	538
Alat-alat tulis	388	347	356
Uang Kursus	403	64	137
Total	6.721	5.516	5.776

Sumber: Susenas 2016

Tabel 6 **Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Masih/ pernah mengikuti Pra sekolah tahun ajaran 2015/2016	20,29	18,99	19,29
Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran 2014/2015	0,53	8,86	6,99
Pernah mengikuti pra sekolah sebelum tahun ajaran 2014/2015	1,58	4,61	3,93
Tidak/belum pernah mengikuti Pra Sekolah	77,60	67,54	69,79
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 7 **Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Kelompok Umur (Tahun)	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 2	0,00	0,00	0,00
3 - 4	5,30	19,09	16,81
5 - 6	75,69	84,20	82,45
0 - 6	22,40	32,47	30,21
3 - 6	45,09	51,57	50,36

Sumber: Susenas 2016

Tabel 8 **Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Wonogiri 2016**

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 2	0,00	0,00	0,00
3 - 4	19,64	13,36	16,81
5 - 6	90,53	75,44	82,45
0 - 6	30,74	29,62	30,21
3 - 6	52,89	47,77	50,36

Sumber: Susenas 2016

Tabel 9 **Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/RA/BA	83,38	74,73	76,17
Kelompok Bermain	0,00	3,70	3,08
Taman Penitipan Anak	16,62	21,57	20,75
Pos PAUD/ PAUD Terintegrasi Posyandu	0,00	0,00	0,00
PAUD Sejenis Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 10 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2014-2016

Tahun	0 – 6 Tahun			3 – 6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Laki-laki	Perempuan	jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	19,06	11,91	15,49	30,95	21,48	26,47
2015	22,35	23,63	22,97	39,14	40,39	39,75
2016	19,10	20,30	19,67	32,85	32,73	32,79

Sumber: Susenas 2014-2016

Tabel 11.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	2,62	10,87	6,91
Masih Bersekolah	20,28	17,42	18,79
Tidak Bersekolah Lagi	77,10	71,71	74,30
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 11.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

<u>Pedesaan</u>			
Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	7,13	15,16	11,29
Masih Bersekolah	20,92	17,48	19,14
Tidak Bersekolah Lagi	71,95	67,36	69,57
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 11.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Kabupaten Wonogiri 2016

<u>Perkotaan + Pedesaan</u>			
Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	6,17	14,23	10,35
Masih Bersekolah	20,79	17,47	19,07
Tidak Bersekolah Lagi	73,04	68,30	70,58
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 12 **Persentase Penduduk Usia 7-12 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,00	1,31	1,06
Masih Bersekolah	100,00	98,69	98,94
Tidak Bersekolah Lagi	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 13 **Persentase Penduduk Usia 13-15 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,00	0,00	0,00
Masih Bersekolah	98,48	97,87	97,99
Tidak Bersekolah Lagi	1,52	2,13	2,01
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 14 **Persentase Penduduk Usia 16-18 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,00	0,00	0,00
Masih Bersekolah	80,01	70,60	73,11
Tidak Bersekolah Lagi	19,99	29,40	26,89
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 15 **Persentase Penduduk Usia 19-24 th menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Partisipasi Sekolah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,00	0,00	0,00
Masih Bersekolah	26,86	18,63	20,34
Tidak Bersekolah Lagi	73,14	81,37	79,66
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 16 **Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Jenjang Pendidikan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	47,62	55,57	53,89
SMP/MTs	24,90	27,09	26,63
SM/MA	17,31	15,43	15,83
PT	10,17	1,91	3,65
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 17.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
7-12	100,00	100,00	100,00
13-15	97,03	100,00	98,48
16-18	74,98	86,48	80,01
19-24	25,36	22,76	24,16

Sumber: Susenas 2016

Tabel 17.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
7-12	99,06	98,32	98,69
13-15	97,32	98,53	97,87
16-18	80,59	62,77	70,60
19-24	8,79	9,12	8,96

Sumber: Susenas 2016

Tabel 17.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Kelompok Umur	Perkotaan+Pedesaan		
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	99,25	98,62	98,94
13-15	97,26	98,84	97,99
16-18	78,80	68,02	73,11
19-24	12,87	12,03	12,46

Sumber: Susenas 2016

Tabel 18.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
SD/MI/ Paket A	102,48	108,31	107,17
SMP/MTs/ Paket B	92,76	87,83	90,35
SMA/SMK/ MA/Paket C	70,74	92,91	80,42
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	28,04	28,95	28,46

Sumber: Susenas 2016

Tabel 18.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

<u>Pedesaan</u>			
Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	108,29	102,73	103,72
SMP/MTs/ Paket B	96,73	88,49	92,98
SMA/SMK/ MA/Paket C	105,57	91,33	97,59
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	8,08	3,90	5,96

Sumber: Susenas 2016

Tabel 18.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Jenjang Pendidikan	Perkotaan+Pedesaan		
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	105,19	105,55	105,48
SMP/MTs/ Paket B	95,97	88,35	92,44
SMA/SMK/ MA/Paket C	94,46	91,68	92,99
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	12,99	9,25	11,13

Sumber: Susenas 2016

Tabel 19.1 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
SD/MI/ Paket A	100,00	100,00	100,00
SMP/MTs/ Paket B	92,76	87,83	90,35
SMA/SMK/ MA/Paket C	66,17	73,88	69,54
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	22,49	18,21	20,51

Sumber: Susenas 2016

Tabel 19.2 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

<u>Pedesaan</u>			
Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	93,87	96,98	95,41
SMP/MTs/ Paket B	86,13	83,26	84,82
SMA/SMK/ MA/Paket C	76,26	58,15	66,10
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	4,60	2,88	3,73

Sumber: Susenas 2016

Tabel 19.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Jenjang Pendidikan	Perkotaan+Pedesaan		
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI/ Paket A	95,07	97,52	96,27
SMP/MTs/ Paket B	87,41	84,24	85,94
SMA/SMK/ MA/Paket C	73,04	61,63	67,02
DI/DII/ DIII/DIV /S1/S2/S3	9,00	6,15	7,58

Sumber: Susenas 2016

Tabel 20.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
15 Tahun ke Atas	98,21	91,21	94,57
15 – 24 Tahun ke Atas	100,00	100,00	100,00
25 – 44 Tahun ke Atas	100,00	99,04	99,46
45 Tahun ke Atas	96,76	84,02	90,27

Sumber: Susenas 2016

Tabel 20.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

<u>Pedesaan</u>			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	93,07	80,31	86,36
15 – 24 Tahun ke Atas	99,11	100,00	99,57
25 – 44 Tahun ke Atas	99,40	100,00	99,72
45 Tahun ke Atas	87,95	63,58	75,22

Sumber: Susenas 2016

Tabel 20.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Kelompok Umur	Perkotaan+Pedesaan		
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	94,20	82,65	88,14
15 – 24 Tahun ke Atas	99,32	100,00	99,67
25 – 44 Tahun ke Atas	99,52	99,79	99,66
45 Tahun ke Atas	89,90	67,90	78,47

Sumber: Susenas 2016

Tabel 21 **Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2016**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	5,41	11,55	10,23
Tidak Tamat SD	11,00	14,83	14,01
SD/MI	38,80	42,17	41,45
SMP/MTs	7,43	13,79	12,42
SM/MA	26,77	13,93	16,69
PT	10,59	3,74	5,21
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 22 **Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	5,54	14,45	10,23
Tidak Tamat SD	12,44	15,42	14,01
SD/MI	44,95	38,29	41,45
SMP/MTs	12,88	12,00	12,42
SM/MA	18,87	14,72	16,69
PT	5,31	5,11	5,21
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016

Tabel 23 **Persentase Siswa Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Kabupaten Wonogiri 2014-2016**

Tipe Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	46,34	65,51	52,11
Perdesaan	39,62	44,65	44,33
Perkotaan + Perdesaan	41,08	49,13	46,07

Sumber: Susenas 2014-2016

Tabel 24 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2014-2016

Tipe Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	7,36		7,18
Perempuan	5,77		6,02
Laki-Laki + Perempuan	6,23	6,39	6,57

Sumber: Susenas 2016

Tabel 25 Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Wonogiri 2016

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Putus Saat SD Kelas 6	0,00	0,00	0,00
Putus Saat SMP Kelas 3	27,89	40,34	34,88
Putus Saat SM Kelas 3	45,77	53,64	49,19

Sumber: Susenas 2016

Tabel 26 Angka Drop Out menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Wonogiri 2016

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
DO - SD	0,45	0,00	0,23
DO - SMP	0,00	1,97	0,97
DO - SM	9,81	0,00	5,09

Sumber: Susenas 2016

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2014, *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2013*. Semarang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2015, *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2014*. Semarang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2016, *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2015*. Semarang

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2016, *Indikator Utama Sosial, Politik Dan Keamanan Jawa Tengah 2015*. Semarang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri,2016, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015*, Wonogiri.

<https://www.linkedin.com/pulse/makna-dan-implikasi-uu-sisdiknas-20-thn-2003-terhadap-fsopiah-zenal>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

∞ *Enlighten The Nation* ∞



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI**

Jl. Pelem II No.8 Wonogiri 57612
Email : bps3312@bps.go.id
Telp : 0273-321055



**SENSUS
EKONOMI**

2016